

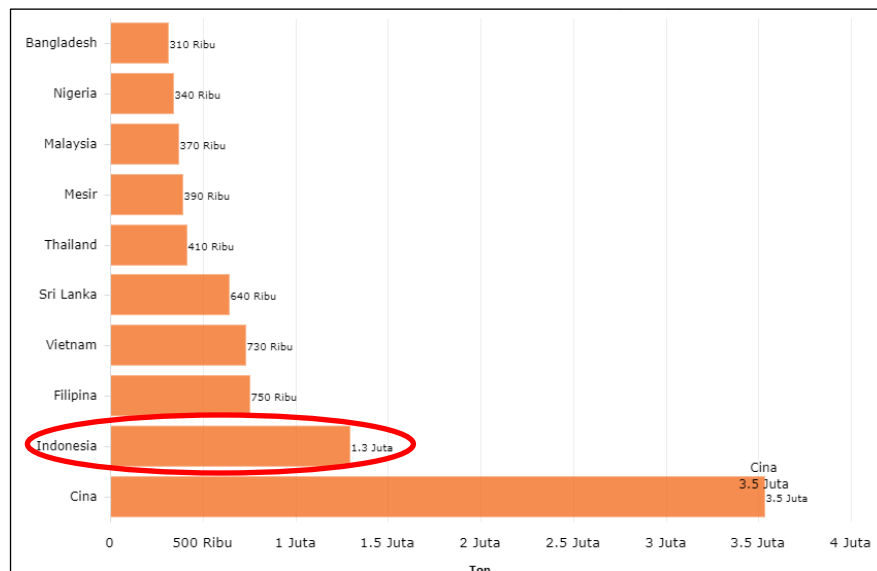
BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sampah merupakan sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (UU RI Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh negara Indonesia ini yaitu persampahan. Sampah sendiri mempunyai permasalahan yang dapat merusak lingkungan melalui pencemaran terhadap tanah, air, dan udara (Statistik Lingkungan Hidup Indonesia, 2016). Seperti yang diketahui bahwa Indonesia dengan jumlah penduduk yang banyak yaitu sebesar 469 juta jiwa (Badan Pusat Statistik, 2018), menjadikan pemerintah Indonesia harus lebih fokus dalam menghadapi permasalahan yang serius dalam penanganan sampah terutama yang dihasilkan oleh rumah tangga. Semakin meningkatnya jumlah penduduk di setiap daerah menyebabkan jumlah sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga juga semakin meningkat.

Indonesia merupakan negara maritim, mempunyai panjang garis pantai yaitu 99.093 Km (KKP, 2018). Dengan panjangnya garis pantai tersebut mempunyai permasalahan persampahan terutama di dalam laut dan kawasan pesisirnya. Seperti diketahui bahwa Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang menjadi salah satu negara penghasil sampah terbanyak. Dapat dilihat pada diagram berikut, bahwa Negara Indonesia menempati peringkat kedua setelah Negara Cina dalam pencemaran sampahnya ke dalam laut. Dengan proporsi sampah yang dibuang ke dalam laut yaitu sebanyak 3,5 juta ton untuk Negara Cina, dan sebesar 1,3 juta ton pada Negara Indonesia.



Sumber: American Association for The Advancement of Science (AAAS) dalam databoks, 2015

GAMBAR 1. 1

DIAGRAM NEGARA PENCEMAR SAMPAH DI LAUT

Berdasarkan data jumlah timbunan sampah yang ada di Negara Indonesia sendiri terdapat jumlah sampah sebanyak 105,8 liter/orang/hari. Sedangkan Provinsi Lampung sendiri memiliki jumlah timbunan sampah terdapat sebanyak 0,62 liter/orang/hari (Cipta karya, 2016). Selanjutnya jumlah timbunan sampah yang ada di Kota Bandar Lampung yang tercatat dalam rekapitulasi jumlah sampah yang dikeluarkan oleh UPT TPA Bakung yaitu sebanyak 802,57 Ton/Hari. Dengan banyaknya jumlah timbunan sampah yang ada di Indonesia dan Provinsi Lampung khususnya Kota Bandar Lampung maka perlu adanya pengelolaan sampah yang tepat.

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan perkotaan dan kawasan, sehingga dibutuhkan penanganan permasalahan sampah yang tepat (S Rendra, 2018). Dalam pengelolaan persampahan yang ada di Kota Bandar Lampung tidak luput dari program pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah khususnya di kawasan pesisir, sebab apabila kawasan pesisir tidak ditangani dengan baik dapat memberikan dampak yang cukup besar terhadap lingkungan.

Adapun program pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di pesisir Kota Bandar Lampung yaitu dengan melalui tahap-tahap diantaranya pembuatan *masterplan* mulai dari pengumpulan, pengangkutan pengurangan, pemrosesan akhir, aspek manajemen, serta rencana garis besar tentang kelembagaan (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019 dalam Bappeda Provinsi Lampung, 2019). Adapun peran pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yaitu melakukan koordinasi antarlembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terwujudnya keterpaduan dalam pengelolaan sampah (Undang-undang No 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah). Terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah daerah perlu berkoordinasi dengan pemangku kepentingan lain contohnya masyarakat, Dinas Lingkungan hidup, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta LSM Lingkungan Hidup Mitra Bentala (Chatlya, 2016) yang memiliki peran besar dalam pengelolaan sampah di Kota Bandar Lampung. Pulau Pasaran merupakan salah satu pulau yang terdapat di kota Bandar Lampung. Tepatnya di Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur.

Pulau Pasaran sudah dikenal sejak lama sebagai sentra ikan asin yang ada di Kota Bandar Lampung (BPS Kota Bandar Lampung, 2018). Pulau Pasaran juga ditetapkan sebagai kawasan minapolitan dengan strategi pengembangan kawasan penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna (RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030). Dengan adanya daya tarik tersendiri sebagai sentra ikan asin, dapat menjadikan Pulau Pasaran sebagai objek wisata yang unik di Kota Bandar Lampung. Akan tetapi tampaknya dari estetika Pulau Pasaran kurang terkelola, hal ini terlihat dari banyaknya sampah yang mencemari lautan sebagaimana foto yang didapatkan dari hasil observasi (2020) berikut.



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1. 2

KONDISI SAMPAH DI PULAU PASARAN

Jumlah sampah yang dihasilkan untuk Pulau Pasaran sendiri berdasarkan perhitungan jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat dalam sehari yaitu sebesar 504,8 kg/hari. Jumlah ini dihasilkan berdasarkan perhitungan jumlah sampah menurut SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan dengan asumsi jumlah sampah yang dihasilkan per orang dalam sehari yaitu 0,4kg. Dengan banyaknya sampah yang kemudian dapat mencemari lautan di sekitar Pulau Pasaran ini menjadikan suatu permasalahan yang cukup serius dan perlu adanya penanganan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Hal tersebut dapat dilihat dari banyaknya sampah disekitar dermaga tempat kapal nelayan berlabuh dan bersandar dan juga dapat dilihat dari jumlah sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Dengan banyaknya sampah yang dihasilkan menjadikan kawasan Pulau Pasaran masuk dalam salah satu ciri dari permukiman kumuh (Suparlan, 2002 dalam Nurwino, 2016). Sampah–sampah tersebut berasal dari masyarakat yang tinggal di Pulau Pasaran dan juga berasal dari wilayah sekitar Pulau Pasaran. Lalu sampah – sampah yang ada dibiarkan menumpuk begitu saja tanpa adanya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh berbagai pihak seperti dari Dinas Lingkungan Hidup, Masyarakat, LSM dan lainnya seperti yang tercantum dalam wawancara yang telah dilakukan oleh berbagai pihak tersebut.

Oleh sebab itu, dengan adanya permasalahan sampah di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung maka perlu adanya pengelolaan persampahan dengan melihat siapa

saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung sehingga diharapkan untuk kedepannya pengelolaan sampah dapat dilakukan dengan melihat pemangku kepentingan yang ikut andil dalam pengelolaan sampah, dan pengelolaan sampah dimasa depan dapat memperhatikan tingkat kepentingan dan pengaruh dari masing – masing pemangku kepentingan. Dengan begitu, penelitian ini dilakukan untuk melihat seberapa besar pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung.

1.2. Rumusan Masalah

Pengelolaan persampahan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan perkotaan, sehingga dibutuhkan penanganan permasalahan sampah yang tepat (S Rendra, 2018). Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh Kota Bandar Lampung adalah belum optimalnya pengelolaan sampah khususnya di kawasan pesisir. Sampah-sampah tersebut berasal dari masyarakat yang ada di Pulau Pasaran itu sendiri. Untuk dapat mengurangi permasalahan tersebut maka perlu adanya pengelolaan sampah yang didukung oleh berbagai pihak.

Pulau Pasaran merupakan salah satu pulau yang terdapat di kota Bandar Lampung. Pulau Pasaran ini sudah dikenal sejak lama sebagai sentra ikan asin yang ada di Kota Bandar Lampung (BPS Kota Bandar Lampung, 2018) dan juga ditetapkan sebagai kawasan minapolitan strategi pengembangan kawasan penggerak ekonomi wilayah dan pemanfaatan teknologi tepat guna (RTRW Kota Bandar Lampung 2011-2030) hal tersebut bisa menjadikan potensi dan menjadikan Pulau Pasaran lebih berkembang. Akan tetapi permasalahan sampah yang lagi – lagi menjadikan kendala untuk mengembangkan potensi yang ada di Pulau Pasaran tersebut. Sebenarnya telah banyak program pemerintah dalam pengelolaan sampah di pesisir Kota Bandar Lampung yaitu dengan melalui tahap-tahap diantaranya pembuatan *masterplan* mulai dari pengumpulan, pengangkutan pengurangan, pemrosesan akhir, aspek manajemen, serta rencana garis besar tentang kelembagaan

(Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung 2019 dalam Bappeda Provinsi Lampung, 2019).

Sebagai contoh keterlibatan persampahan adalah tentang pemangku kepentingannya yaitu keterlibatan pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah dapat dilihat di Kabupaten Trenggalek yaitu peran kelembagaan pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek (Puspasari, 2016). Dalam kasus ini kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek meliputi Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan pihak swasta dan LSM belum berperan dalam pengelolaan sampah. Dalam artian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek belum optimal, karena tidak semua pemangku kepentingan yang ada ikut berperan dalam pengelolaan sampah.

Selain itu juga, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Chatlya (2016) bahwa pengelolaan sampah yang ada di pesisir Kota Bandar Lampung yang telah dilakukan oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan, LSM Mitra Bentala dan juga masyarakat belum optimal. Lalu belum adanya koordinasi dalam pengelolaan sampah yang cukup baik dari setiap pihak tersebut. Selain itu pihak yang terlibat hanya dari pihak pemerintah, LSM dan juga masyarakat. Sedangkan secara ideal pengelolaan sampah dapat dilakukan oleh pemerintah, sektor swasta, LSM, Masyarakat serta akademisi akan tetapi melihat dari kondisi persampahan yang ada di Pulau Pasaran yang masih banyaknya tumpukan sampah menjelaskan bahwa masih belum adanya pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah tersebut.

Oleh karena itu dibutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dan seberapa besar tingkat pengaruh dan kepentingannya terhadap pengelolaan sampah di Pulau Pasaran ini baik dari pemerintah, masyarakat, LSM, swasta maupun akademisi. Karena idealnya pengelolaan sampah yang ada dilakukan dengan melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, sektor swasta, LSM, masyarakat serta akademisi. Dengan adanya rumusan masalah diatas, maka timbullah pertanyaan penelitian, yaitu

“Bagaimanakah tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah?”

1.3. Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian yang telah dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat Pengaruh dan Kepentingan para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Untuk mencapai tujuan ini, maka sasaran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Identifikasi kondisi pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.
2. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.
3. Identifikasi pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat yang baik secara praktis maupun teoritis. Manfaat tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat Secara Teoritis

Pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung ini diharapkan dapat memperkaya rujukan terkait pengelolaan, inisiatif, dan kreativitas dari pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah khususnya di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung, serta lebih dapat berkoordinasi antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.

1.4.2. Manfaat Secara Praktis

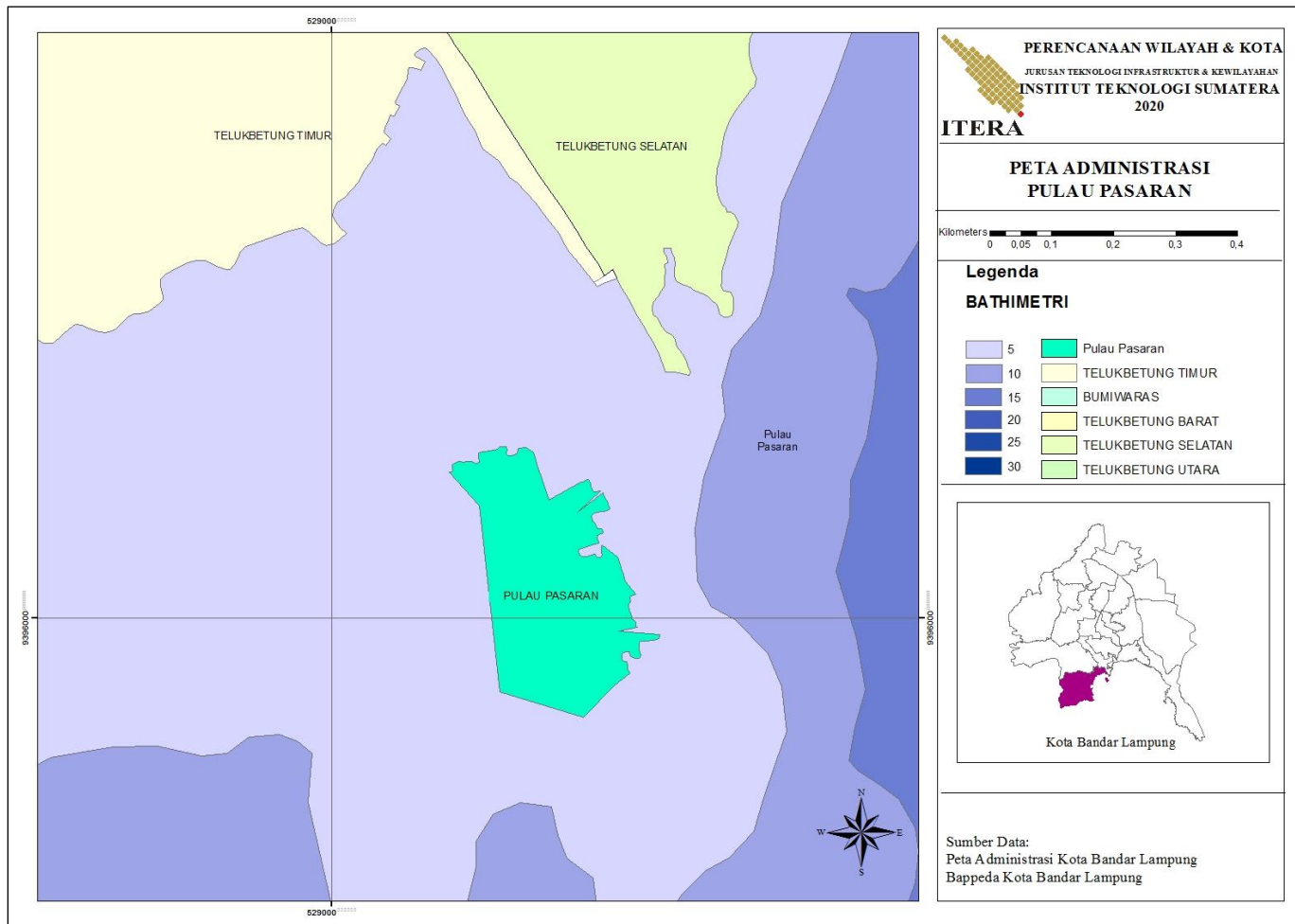
Penelitian mengenai identifikasi pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah di kawasan pesisir khususnya di Pulau Pasaran ini diharapkan dapat memberikan manfaat rekomendasi kepada pemerintah daerah setempat dalam pengelolaan dan penanganan sampah di Pulau Pasaran yang dapat dilakukan dengan cara kerjasama antar pemangku kepentingan. Rekomendasi yang dapat diberikan dalam penelitian yaitu dengan teridentifikasinya pemangku kepentingan yang mempunyai kepentingan dan pengaruh dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran serta teridentifikasinya pemangku kepentingan yang yang belum berperan Sehingga dengan teridentifikasinya pemangku kepentingan yang mempunyai pengaruh tinggi dan kepentingan tinggi agar dapat meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah yang ada di Pulau Pasaran agar penanganan sampah di Pulau Pasaran menjadi lebih baik. Dan juga memberikan manfaat kepada masyarakat berupa menjadikan masyarakat mandiri dalam menangani permasalahan sampah yang sedang dihadapi di wilayahnya sendiri tanpa harus terlalu bergantung kepada pemerintah daerah.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian terdiri dari ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi. Adapun penjelasan lebih rinci dari ruang lingkup penelitian dijelaskan sebagai berikut.

1.5.1. Ruang Lingkup Wilayah

Ruang lingkup yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kota Bandar Lampung. Dengan objek penelitian yaitu Pulau Pasaran, Kelurahan Kota Karang, Kecamatan Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Berikut adalah gambaran yang akan menjadi wilayah studi dalam penelitian ini.



Sumber: Bappeda Kota Bandar Lampung dengan modifikasi, 2020

GAMBAR 1. 3

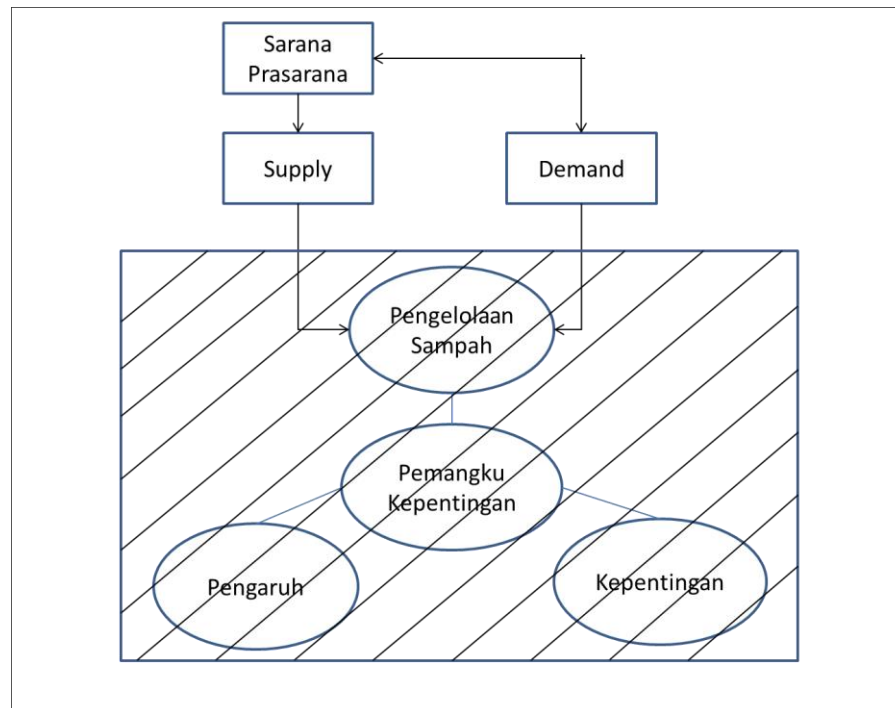
PETA ADMINISTRASI PULAU PASARAN

1.5.2. Ruang Lingkup Materi

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Yang dimaksud dalam kajian pemangku kepentingan ini berfokus kepada kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Adapun batasan materi yang dikaji dalam penelitian ini yaitu:

- a. Penelitian ini untuk melihat kondisi permasalahan persampahan yang terdapat di Pulau Pasaran serta melihat metode apa saja yang digunakan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Dalam hal ini juga bertujuan untuk mengetahui sumber sampah yang terdapat di Pulau Pasaran, metode pengelolaan sampahnya dan juga skema pengangkutan sampah yang terdapat di Pulau Pasaran tersebut.
- b. Penelitian ini untuk mencari pemangku kepentingan dan dari pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Dengan tujuan untuk mengetahui pihak mana saja yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.
- c. Selanjutnya pada penelitian ini juga bertujuan untuk menganalisis pemangku kepentingan yang seharusnya secara ideal terdapat dari pihak pemerintah, masyarakat, swasta, LSM dan akademisi (Puspita, 2016). Akan tetapi pada sesungguhnya dilapangan pihak yang terlibat dalam pengelolaan sampah yaitu dari pihak pemerintah diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kelurahan Kota Karang, dan UPT Kebersihan Kecamatan Teluk Betung Timur. Sedangkan dari pihak masyarakat diwakili oleh Ketua RT 09 dan 10 Pulau Pasaran. Selajutnya dari pihak lembaga swadaya masyarakat diwakili oleh LSM Mitra Bentala dan dari pihak akademisi diwakili oleh Program Studi Teknik Lingkungan, dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi

Sumatera. Sehingga dalam penelitian ini pemangku kepentingan yang dikaji hanya pemangku kepentingan yang disebutkan diatas. Yang dilihat pemangku kepentingan mana saja yang mempunyai pengaruh dan kepentingan terhadap pengelolaan sampah yang ada di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Berikut kedudukan metode pengelolaan sampah dengan melihat pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan memiliki pengaruh.



Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1. 4
DIAGRAM RUANG LINGKUP MATERI PENELITIAN

1.6. Metodologi Penelitian

Pendekatan metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deduktif dengan metode penelitian campuran (*mix methods*). Menurut W.Gulo (2002) mengatakan bahwa pendekatan deduktif adalah pendekatan yang ditarik dari teori-teori dengan proporsi tertentu yang kemudian

dilakukan pengamatan secara empiris dilapangan. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian campuran. *Mix Methods* yang digunakan pada penelitian ini untuk mengetahui tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Badar Lampung.

1.6.1. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini yaitu pemangku kepentingan pengelola sampah di Pulau Pasaran. Pemangku kepentingan terdiri dari:

- a. Pemerintah Daerah yang diwakili oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Kelurahan Kota Karang dan juga UPT Kebersihan Kecamatan Teluk Betung Timur.
- b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diwakili oleh LSM Mitra Bentala.
- c. Masyarakat yang diwakili oleh Ketua RT 09 dan Ketua RT 10, Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.
- d. Akademisi yang diwakili oleh Program Studi Teknik Lingkungan dan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera.

1.6.2. Data dan Teknik Pengambilan

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Kedua data yang dikumpulkan ini kemudian digunakan sebagai bahan dalam melakukan analisis dari penelitian ini. Adapun jenis data yang akan didapatkan dibagi menjadi 2 yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diambil dengan cara peneliti terjun langsung kelapangan untuk mendapatkan data dengan menggunakan teknik pengambilan data berupa observasi dan wawancara kepada masyarakat maupun *stakeholders* lain. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986) dalam Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa observasi merupakan suatu proses yang kompleks, dua proses diantaranya yaitu pengamatan dan ingatan. Dapat dikatakan bahwa observasi merupakan pengamatan secara langsung yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat kondisi eksisting persampahan yang ada di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung serta melakukan *geotagging* yang kemudian dilakukan untuk menentukan titik lokasi sampah yang terdapat di Pulau Pasaran. Kemudian dimasukkan kedalam gambaran umum pada penelitian ini. *Geotagging* merupakan suatu teknik yang digunakan untuk menentukan titik koordinat yang kemudian dapat di masukan kedalam aplikasi sistem informasi geospasial (SIG). adapun alat yang dapat digunakan berupa GPS Navigasi untuk Menentukan titik-titik lokasi sampah yang terdapat di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Sedangkan objek yang di observasi dalam penelitian ini yaitu tumpukan-tumpukan sampah yang terdapat di dalam Pulau Pasaran dan juga sekitar Pulau Pasaran. Tumpukan sampah tersebut bersumber dari masyarakat didalam Pulau Pasaran itu sendiri dan juga berasal dari masyarakat sekitar Pulau Pasaran yang membuang sampah ke sungai.

b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dengan cara menanyakan langsung kepada responden terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. Hal yang ditanyakan dalam wawancara tersebut yaitu mengenai metode pengelolaan sampah yang ada di Pulau Pasaran. Wawancara yang dilakukan yaitu dengan metode wawancara terstruktur, dimana pertanyaan yang akan ditanyakan kepada narasumber berdasarkan dengan pertanyaan yang sudah tercantum dalam instrument penelitian. Pertanyaan tersebut akan ditujukan kepada Ketua RT Pulau Pasaran serta petugas kebersihan yang ada di Pulau Pasaran. Pertanyaan yang akan ditanyakan selanjutnya yaitu mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dan

mempunyai peran, pengaruh dan kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dimana pertanyaan ini ditujukan kepada pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, Sektor Swasta, Masyarakat, LSM dan juga Akademisi yang terkait dengan persampahan di wilayah studi penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui studi literatur yang dihasilkan dari instansi terkait, website resmi, maupun berasal dari jurnal, skripsi, dan tesis terdahulu. Studi literatur dalam data sekunder ini juga dilakukan untuk mengetahui jumlah sampah yang dihasilkan Pulau Pasaran setiap harinya, selain itu juga mengetahui skema pengangkutan sampah dan metode pengelolaan sampah yang ada dalam lokasi penelitian tersebut serta untuk mengetahui profil dari masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat.

1.6.3. Metode Pengambilan Sampel

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara dalam pengambilan data, hal ini dilakukan karena akan tidak efisien dan kurang relevan jika menggunakan teknik *Probability Sampling* karena tidak semua anggota populasi di wilayah studi memiliki tingkat pengetahuan yang sama dalam hal pengelolaan sampah. Selain itu, populasi dalam penelitian ini juga tidak hanya penduduk di wilayah studi tetapi juga dari pemerintah yang bekerja lintas kecamatan. Maka dalam konteks ini, penggunaan teknik *Non Probability Sampling* dianggap lebih relevan dengan topik penelitian ini. Adapun dalam pengambilan sampel wawancara menggunakan teknik *Non probability Sampling* yaitu dengan teknik *Sampling Purposive*. Menurut Sugiyono (2018) *Sampling Purposive* ialah teknik pengentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan akan menggunakan beberapa pertimbangan kepada orang yang akan dilakukan wawancara.

Dalam penelitian ini, pemilihan narasumber mengacu pada penelitian yang relevan dengan tema pengelolaan sampah yang sudah pernah dilakukan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Chatlya (2016), terdapat beberapa pihak yang disebutkan sebagai pengelola sampah di Bandar Lampung, yaitu dari pihak pemerintah lebih tepatnya Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dari pihak LSM yaitu LSM Mitra Bentala dan masyarakat. Kriteria diambil berdasarkan penelitian tersebut dan juga dikembangkan lagi yaitu orang yang mengetahui tentang pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, orang yang sudah lama tinggal di Pulau Pasaran, serta pemangku kepentingan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah, terutama di Pulau Pasaran Kota Bandar Lampung. Untuk lebih rincinya berikut kriteria responden dalam penelitian ini yaitu:

1. Pemerintah

Kriteria pemilihan Narasumber:

- a. Bekerja dibidang atau di dinas yang berkaitan dengan persampahan dengan memiliki pengalaman kerja.
- b. Memiliki kewenangan terhadap pengelolaan sampah di wilayah studi.
- c. Memiliki jabatan minimal Kasi bidang persampahan.
- d. Memiliki peran dalam pengambilan keputusan.

Adapun narasumber yang didapatkan dari pihak pemerintah terdapat dari tiga instansi yaitu :

- a) Dinas Lingkungan Hidup yang diwakili oleh Bapak Anisar dengan jabatan Kasi Pengembangan Teknologi dan Inovasi Pengelolaan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- b) Kelurahan Kota Karang yang diwakili oleh Bapak Syamsudin dengan jabatan Ketua Kelurahan Kota Karang.
- c) UPT Kebersihan Kecamatan Teluk Betung Timur yang diwakili oleh Bapak Gunawan dengan jabatan Ketua UPT Kebersihan Kecamatan Kota Karang.

2. Sektor Swasta

Kriteria pemilihan narasumber:

- a. Pernah berkontribusi dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran baik secara finansial maupun non finansial.

3. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Kriteria pemilihan narasumber:

- a. Pernah berkontribusi dan ikut serta dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.
- b. Pernah mendirikan suatu kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.

Adapun narasumber yang didapatkan dari pihak Lembaga Swadaya Masyarakat terdapat dari LSM Mitra Bentala yang diwakili oleh Bapak Mashabi selaku Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Mitra Bentala. Berdasarkan kriteria yang ada dapat dikatakan bahwa LSM Mitra Bentala masuk kedalam kriteria tersebut dikarenakan LSM Mitra Bentala pernah ikut berkontribusi dan ikut serta dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dengan cara mendirikan bank sampah di lokasi tersebut.

4. Masyarakat

Kriteria pemilihan narasumber:

- a. Masyarakat yang memiliki peran penting di lingkungan Pulau Pasaran.
- b. Masyarakat yang memiliki kewenangan tinggi di lingkungan Pulau Pasaran.
- c. Masyarakat yang sudah lama tinggal di Pulau Pasaran dengan minimal tinggal 5 tahun.
- d. Mengetahui permasalahan persampahan yang terdapat di Pulau Pasaran.
- e. Terlibat langsung dalam pengelolaan sampah yang terdapat di Pulau Pasaran.

Adapun narasumber yang didapatkan dari pihak masyarakat terdiri dari dua, yaitu:

- a) RT 09 yang diwakili oleh Bapak Said selaku Ketua RT 09 Pulau Pasaran, dan
- b) RT 10 yang diwakili oleh Bapak Suhaidi selaku Ketua RT 10 Pulau Pasaran.

Berdasarkan kriteria yang ada dapat dikatakan bahwa Ketua RT yang terdapat di Pulau Pasaran masuk kedalam kriteria tersebut dikarenakan seluruh koordinasi dan kewenangan tertinggi di Pulau Pasaran dipegang oleh masing masing Ketua RT. Dan

juga Ketua RT mempunyai peran penting dalam lingkungannya. Berdasarkan wawancara Ketua RT juga sudah lama tinggal di Pulau Pasaran, sehingga mereka mengetahui permasalahan sampah yang ada di wilayahnya.

5. Akademisi

Kriteria pemilihan narasumber:

- a. Memiliki pengetahuan dalam pengelolaan sampah/lingkungan.
- b. Pernah melaksanakan/menerbitkan tulisan ilmiah tentang sampah.
- c. Setidaknya memiliki gelar sarjana.

Adapun narasumber yang didapatkan dari pihak akademisi yaitu berasal dari dosen Program Studi Teknik Lingkungan, dan dosen Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Institut Teknologi Sumatera.

Selain menggunakan teknik *Sampling Purposive*. Pengumpulan data dan wawancara juga dilakukan berdasarkan hasil rujukan dari pemangku kepentingan yang telah ditetapkan yaitu berdasarkan penelitian milik Chatlya (2016), namun tetap memperhatikan kriteria berdasarkan yang telah ditentukan pada *sampling purposive*. Yang mana narasumber yang dihasilkan berdasarkan hasil rujukan dengan melihat kriteria yang telah ditetapkan yaitu UPT Kebersihan Kecamatan Teluk Betung Timur. Wawancara kepada narasumber ini dilakukan berdasarkan masukan dari Dinas Lingkungan Hidup yang sebelumnya sudah diwawancarai terlebih dahulu.

1.6.4. Teknik Validasi Data

Teknik validasi data dalam penelitian ini yaitu dengan metode triangulasi sumber data. Menurut (Rahardjo, 2010), Triangulasi sumber data adalah dengan menggali kebenaran informasi tertentu melalui berbagai metode dan sumber perolehan data. Contohnya seperti wawancara, observasi, dokumen tertulis, arsip dan lainnya. Dalam penelitian ini perolehan sumber data didapatkan melalui wawancara terstruktur dan juga melalui observasi lapangan. Dengan masing-masing cara tersebut akan menghasilkan data yang berbeda dan juga data memberikan kebenaran yang dapat dipercaya.

TABEL I. 1
KETERSEDIAAN DATA

No.	Sasaran	Judul Data	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Ketersediaan Data	Unit Data	Sumber Data	Output
1.	Identifikasi kondisi sampah pengelolaan di Pulau Pasaran, Kota Lampung	Cara Pengelolaan sampah	Data Primer	Wawancara	Tidak Tersedia	Ketua RT Pulau Pasaran	Ketua RT	Metode Pengelolaan sampah yang ada di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.
		Pengangkutan Sampah	Data Primer	Wawancara	Tidak Tersedia	Ketua RT, Pengangkut sampah Pulau Pasaran	Ketua RT dan Pengangkut sampah Pulau Pasaran	Metode Pengangkutan Sampah yang ada di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung
		Jumlah Sampah dan volume sampah di Pulau Pasaran	Data Sekunder	Studi Literatur	Tidak Tersedia / menggunakan perhitungan	Bidang Kebersihan	Dinas Persampahan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung	Jumlah sampah yang dihasilkan oleh Pulau Pasaran setiap tahun.
		Skema Pengangkutan Sampah di Pulau Pasaran	- Data Sekunder - Data Primer	- Studi Literatur - Wawancara	Tidak Tersedia	Bidang Kebersihan	Dinas Persampahan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung, Ketua RT	Skema pengangkutan sampah yang ada di Pulau Pasaran.
		Sumber Sampah	Data Primer	Wawancara	Masyarakat, dan sampah aliran sungai sekitar	Ketua RT / Masyarakat	Ketua RT dan Masyarakat Pulau Pasaran	Sumber Sampah yang terdapat di Pulau Pasaran

No.	Sasaran	Judul Data	Jenis Data	Teknik Pengambilan Data	Ketersediaan Data	Unit Data	Sumber Data	Output
					P.Pasaran			
			Data Primer	• Observasi • Geotagging	2020		Wilayah Studi (Pulau Pasaran)	
2.	Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.	Profil pemangku kepentingan	Data Sekunder	Studi Literatur	Tidak Tersedia	Stakeholders yang terlibat dalam pengelolaan sampah Pulau Pasaran	Dinas Persampahan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung, Masyarakat Pulau Pasaran (Ketua RT), LSM, Akademisi, Sektor swasta	Profil Stakeholders yang terkait dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung
			Data Primer	Wawancara	Berdasarkan hasil wawancara			
3.	Identifikasi pengaruh dan kepentingan para Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah	Data Primer	Wawancara	Berdasarkan hasil wawancara	Pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah Pulau Pasaran	Dinas Persampahan/Dinas Lingkungan Hidup/Dinas Kebersihan Kota Bandar Lampung, Masyarakat Pulau Pasaran (Ketua RT), LSM, Akademisi, Sektor swasta	Pemangku Kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung

Sumber: Peneliti, 2020

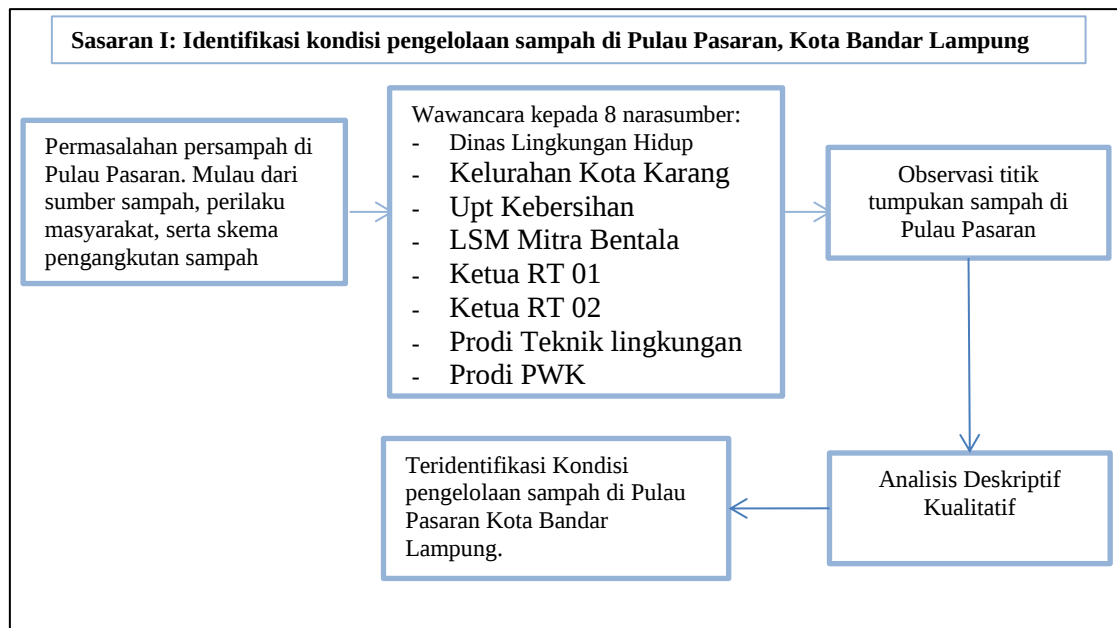
1.6.5. Metode Analisis Data

Metode analisis data ini dilakukan untuk menjawab tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif dan analisis pemangku kepentingan. Yang kemudian penjelasan analisis ini akan dijelaskan berdasarkan sasaran yang ada dengan penjelasan sebagai berikut.

A. Identifikasi Kondisi Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran

Pada sasaran pertama dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif ini merupakan suatu metode analisis dengan mendeskripsikan data yang telah didapatkan. Menurut (Mulyadi, 2011) analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti. Adapun data yang akan dideskripsikan dalam analisis ini yaitu bagaimana cara pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dan sumber sampah yang dihasilkan di Pulau Pasaran tersebut. Dalam pengambilan data pada sasaran 1 ini dilakukan dengan metode wawancara. Selanjutnya data yang dihasilkan juga merupakan metode pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, serta skema pengangkutan sampah yang diterapkan dalam kondisi eksistingnya yang mana dalam pengambilan datanya dilakukan dengan metode wawancara yang dilakukan dengan instansi terkait dan pemangku kepentingan yang terkait.

Analisis deskriptif ini bermaksud untuk mengolah data sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih berguna. Pada sasaran ini yaitu Identifikasi kondisi pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dijelaskan mengenai metode pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah yang dihasilkan, jumlah sampah, perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta skema pengangkutan sampah yang ada di Pulau Pasaran. Metode pengelolaan sampah ini diperoleh dari hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat serta pemangku kepentingan yang terlibat dan mengetahui permasalahan sampah di Pulau Pasaran.



Sumber: Penulis, 2020

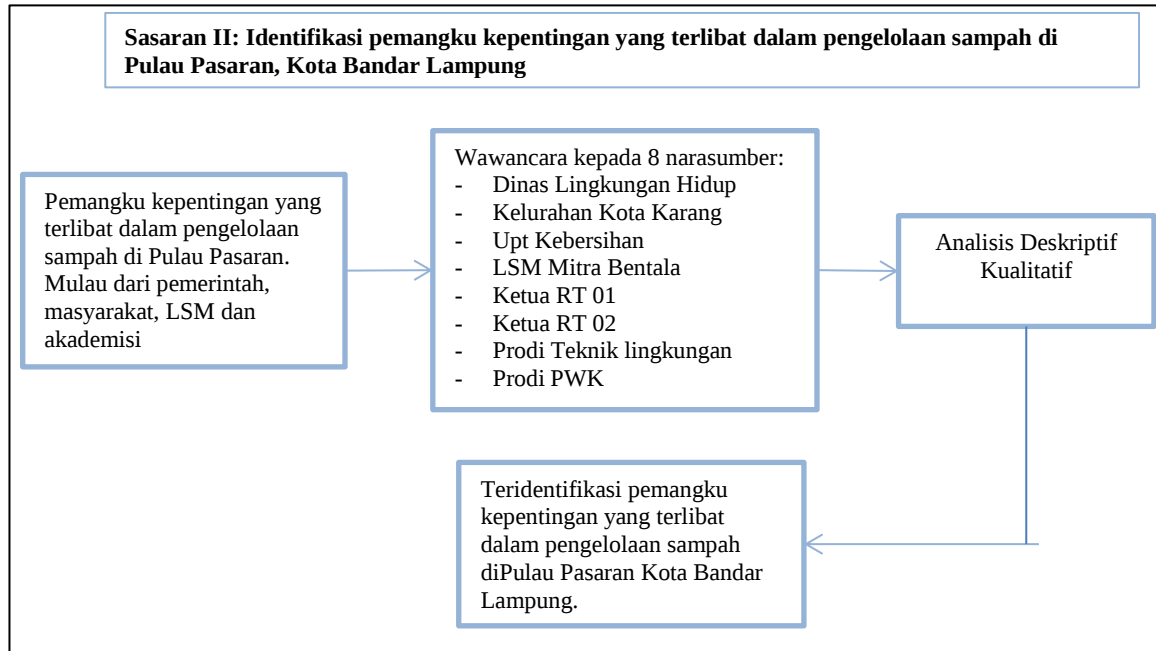
GAMBAR 1. 5
SKEMA OPERASIONAL SASARAN I

Adapun tujuan dari sasaran ini yaitu untuk mengetahui kondisi pengelolaan sampah yang terdapat di Pulau Pasaran. Yang didalamnya terdapat sumber sampah dan jumlah sampah, perilaku masyarakat serta skema pengangkutan sampah yang terdapat di Pulau Pasaran tersebut. Dengan output dari sasaran ini yaitu sumber sampah dan jumlah sampah, perilaku masyarakat dalam membuang sampah serta skema pengangkutan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.

B. Identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran

Pada sasaran kedua ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Menurut (Mulyadi, 2011) analisis deskriptif yaitu suatu analisis yang dilakukan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial dengan cara mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang di teliti. Adapun data yang dideskripsikan yaitu data pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Adapun data tersebut

dihasilkan berdasarkan wawancara kepada pemangku kepentingan yang terlibat dan juga studi literatur dari pemangku kepentingan tersebut.



Sumber: Penulis, 2020

GAMBAR 1. 6
SKEMA OPERASIONAL SASARAN II

Pada sasaran ini yaitu identifikasi pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran dijelaskan mengenai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Dengan tujuan dari sasaran ini untuk menjelaskan satu per satu mengenai siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Dengan output pada sasaran ini yaitu pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Badar Lampung.

C. Identifikasi pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.

Dalam penelitian ini, yaitu mengenai identifikasi pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan dilakukan dengan menggunakan analisis *stakeholders* atau analisis pemangku kepentingan. Meskipun banyak studi bertema pengelolaan sampah banyak menggunakan metode *Analysis Network Theory* dan *System Dynamics*, dalam penelitian ini tidak berfokus pada keagenan manusia dan non-manusia sebagai ciri khas ANT hal tersebut berdasarkan dari teori dari Callon and Law (1989) dalam Mulyana (2018). Selain itu, studi ini juga tidak bertujuan untuk menghasilkan sebuah modeling pengelolaan sampah dan hanya fokus pada analisis tingkat pengaruh dan kepentingan pemangku kepentingannya saja. Oleh karenanya, penggunaan metode *system dynamics* dalam penelitian juga dianggap kurang relevan dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

Oleh sebab itu, pada sasaran ketiga ini analisis yang digunakan yaitu analisis *Stakeholders* / analisis pemangku kepentingan. Analisis pemangku kepentingan yaitu suatu analisis pemangku kepentingan terhadap para aktor yang terlibat dalam tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran pada saat ini dan masa yang akan datang. Sehingga dapat lebih tepat untuk digunakan dalam penelitian ini. Analisis pemangku kepentingan dilakukan dengan mengikuti rangkaian analisis yang dilakukan oleh Reed et al. (2009) dalam Triyanti (2019) yang meliputi:

1. Identifikasi Pemangku Kepentingan

Dalam hal ini aktor siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, aktor yang terlibat berupa Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung, Kelurahan Kota Karang, UPT Kebersihan Kecamatan Teluk Betung Timur, LSM Mitra Bentala, Masyarakat Pulau Pasaran serta akademisi yang melakukan penelitian mengenai persampahan ataupun lingkungan hidup.

2. Pengelompokkan dan pengkategorian

Untuk mengelompokkan dan mengkategorikan pemangku kepentingan berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh. Dibuat tabel jumlah pengaruh dan jumlah kepentingannya dalam pengelolaan sampah melalui deskripsi pertanyaan yang dinyatakan dalam ukuran kuantitatif (skor) kepada responden. Penetapan nilai menggunakan rekomendasi dari pemangku kepentingan lain. Dan juga penilaian dengan cara wawancara yang akan dilakukan. Dalam menentukan tingkat kepentingan dan pengaruh pemangku kepentingan menggunakan modifikasi dari analisis kepentingan dan pengaruh berdasarkan Nurfitriani (2015) Adapun nilai kepentingan terdiri atas kepentingan pemangku kepentingan, tingkat keterlibatan para pihak, dukungan kegiatan para pihak dalam pengelolaan sampah. sedangkan nilai pengaruh terdiri atas kemampuan pemangku kepentingan dalam memengaruhi masyarakat dalam pengelolaan sampah, peran pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah.

TABEL I. 2

KETENTUAN PEMBERIAN SKOR DALAM PENGELOMPOKKAN KUANTITATIF

Skor	Kriteria	Keterangan	Indikator
Kepentingan Para Pihak			
5	Sangat Baik	Sangat Berkepentingan	Memiliki kepentingan, keterlibatan dan dukungan dalam pengelolaan sampah (lebih dari 1 kegiatan)
4	Baik	Berkepentingan	Memiliki kepentingan, keterlibatan dan dukungan dalam pengelolaan sampah
3	Cukup Baik	Cukup Berkepentingan	Memiliki kepentingan dan keterlibatan, tetapi tidak ada dukungan dalam pengelolaan sampah
2	Kurang Baik	Kurang Berkepentingan	Hanya Memiliki Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah
1	Tidak Baik	Tidak Berkepentingan	Tidak Memiliki Kepentingan, Keterlibatan dan Dukungan dalam pengelolaan Sampah
Skor	Kriteria	Keterangan	Indikator

Skor	Kriteria	Keterangan	Indikator
Pengaruh Para Pihak			
5	Sangat Baik	Sangat Memengaruhi	Memiliki peran dan pengaruh dalam pengelolaan sampah (disebutkan oleh lebih dari 3 pemangku kepentingan dan sesuai eksisting)
4	Baik	Memengaruhi	Memiliki pengaruh dan peran dalam pengelolaan sampah (disebutkan oleh kurang dari 3 pemangku kepentingan dan sesuai eksisting)
3	Cukup Baik	Cukup Memengaruhi	Memiliki pengaruh akan tetapi perannya rendah dalam pengelolaan sampah (tidak disebutkan oleh pemangku kepentingan lain).
2	Kurang Baik	Kurang Memengaruhi	Hanya memiliki pengaruh/hanya memiliki peran dalam pengelolaan sampah
1	Tidak Baik	Tidak Memengaruhi	Tidak memiliki pengaruh dan peran dalam pengelolaan sampah

Sumber: Nurtjahjawilasa et al dengan modifikasi, 2020

Setelah penilaian pemangku kepentingan dilakukan dengan memberikan skor pada masing-masing pemangku kepentingan, kemudian para pemangku kepentingan dikelompokkan berdasarkan kepentingan dan pengaruhnya dalam tabel berikut.

TABEL I. 3
PENGELOMPOKKAN KUANTITATIF ATAS KEPENTINGAN DAN PENGARUH PEMANGKU KEPENTINGAN

No.	Stakeholders	Skor Kepentingan	Skor Pengaruh
1.	Pemerintah		
2.	Sektor Swasta		
3.	Masyarakat		
4.	LSM		
5.	Akademisi		

Sumber: Peneliti, 2020

Adapun penentuan tinggi rendah dalam penilaian kuantitatif dikelompokkan berdasarkan tinggi dan rendah dimana :

1. Kepentingan: a. Kepentingan Tinggi diberikan skor ≥ 3
b. Kepentingan Rendah diberikan skor < 3
2. Pengaruh : a. Pengaruh Tinggi diberikan skor ≥ 3
b. Pengaruh Rendah diberikan skor < 3

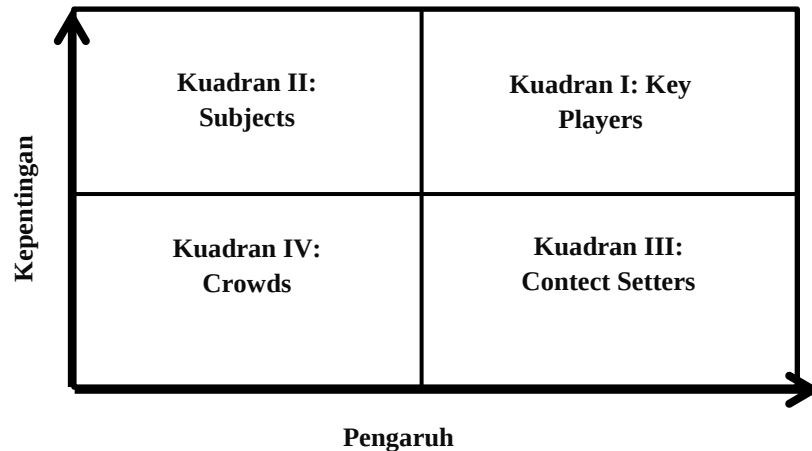
Sehingga ditentukan skor untuk membentuk kuadran dari masing – masing pemangku kepentingan dengan gambaran tabel sebagai berikut:

TABEL I. 4
GAMBARAN ANALISIS PEMANGKU KEPENTINGAN

No.	Stakeholders	Kepentingan	Pengaruh
1.	Pemerintah	T/R	T/R
2.	Sektor Swasta		
3.	Masyarakat		
4.	LSM		
5.	Akademisi		

Sumber: Peneliti, 2020

Selanjutnya komulatif nilai skor dari pertanyaan dijumlahkan dan dipetakan kedalam matriks kepentingan dan pengaruh (Reed et al (2009) dalam Nurtjahjawilasa et al, 2015).



Sumber: Nurtjahjawilasa et al, 2019

GAMBAR 1. 7

DIAGRAM KEPENTINGAN DAN PENGARUH PARA PEMANGKU KEPENTINGAN

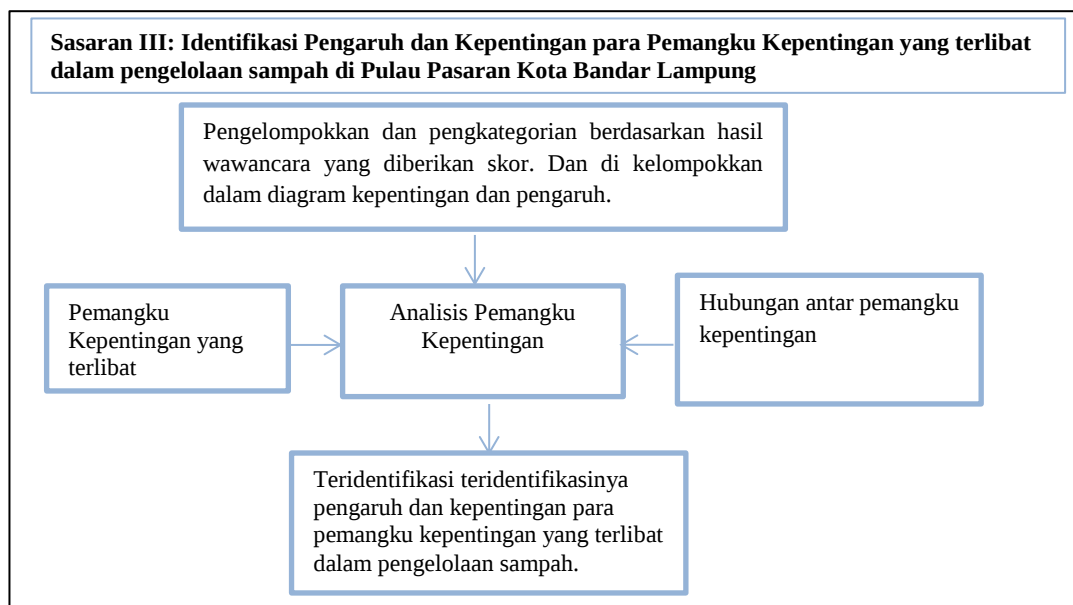
Posisi setiap kuadran menggambarkan posisi pengaruh dan tingkat kepentingan serta peranan masing masing pihak yang dikategorikan sebagai berikut (Reed et al, 2009 dalam Nurtjahjawilasa et al, 2015):

- a. *Key Player*, adalah pihak - pihak yang aktif dan mempunyai kepentingan serta pengaruh yang tinggi.
- b. *Subjects*, yaitu para pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan yang tinggi tetapi pengaruhnya rendah dan walaupun mendukung kegiatan akan tetapi kapasitasnya terhadap dampak kecil.
- c. *Contact Setters*, adalah para pihak yang mempunyai pengaruh yang tinggi tetapi kepentingannya rendah sehingga dapat menjadi resiko yang signifikan.
- d. *Crowds*, yaitu pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan dan pengaruh yang rendah/sedikit terhadap hasil yang diinginkan.

3. Hubungan Antar Pemangku Kepentingan

Tahapan berikutnya dalam analisis pemangku kepentingan adalah dengan mendalami hubungan antar pemangku kepentingan secara deskriptif. Dengan menggunakan kata kunci yang menggambarkan hubungan para pihak yaitu: saling mengisi dan bekerja sama. Hubungan – hubungan yang terjadi dijelaskan

secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai keterkaitan antara pemangku kepentingan yang berperan dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Secara deskriptif hubungan antara pemangku kepentingan ini digambarkan dalam *matriks actorlinkage* hubungan antar pemangku kepentingan dalam pengelolaan sampah yang terdapat di Pulau Pasaran yang teridentifikasi adalah konflik, saling mengisi dan bekerja sama (Reed et al, 2009 dalam nurfitriani, 2015).



Sumber: Penulis, 2020

GAMBAR 1. 8
SKEMA OPERASIONAL SASARAN III

Metode-metode analisis yang digunakan dalam setiap sasaran pada penelitian memiliki keterkaitan yaitu analisis yang digunakan pada masing-masing sasaran harus dapat dilakukan dan bertahap karena setiap hasil studi yang dihasilkan mempengaruhi analisis yang digunakan pada analisis selanjutnya. Sasaran Satu dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kualitatif untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan persampahan di Pulau Pasaran mulai dari kondisi persampahannya, perilaku masyarakat dan juga skema pengangkutan sampah yang ada di Pulau Pasaran. Lalu, pada sasaran dua dilakukan

analisis deskriptif kualitatif untuk menjelaskan pemangku kepentingan manasaha yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Selanjutnya pada sasaran tiga yaitu menggunakan analisis pemangku kepentingan, dalam analisis ini dilakukan dengan tiga tahap yaitu pemangku kepentingan yang terlibat, pengelompokkan dan pengkategorian serta hubungan antar pemangku kepentingan.

1.7. Kerangka Pemikiran Penelitian

Latar Belakang

Pulau Pasaran merupakan pulau kecil di Kota Bandar Lampung yang memiliki permasalahan terkait pengelolaan sampah

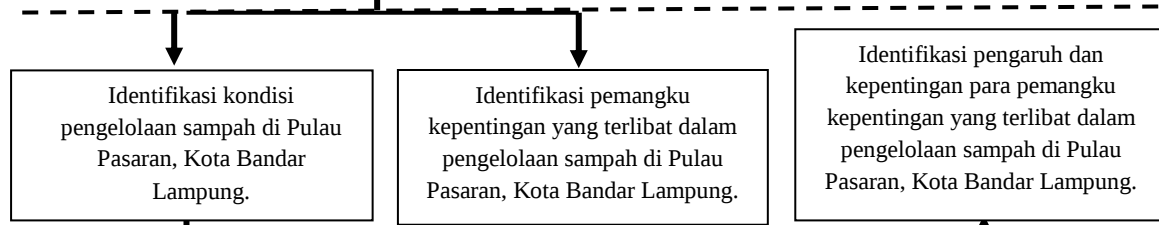
Akan tetapi nampaknya dari estetika Pulau Pasaran kurang terkelola. Dengan banyaknya sampah yang mencemari lautan di wilayah Pulau Pasaran ini menjadikan suatu permasalahan yang cukup serius dan perlu adanya penanganan pemerintah daerah Kota Bandar Lampung. Dengan banyaknya sampah menjadikan pulau pasaran sebagai salah satu ciri dari permukiman kumuh.

Pertanyaan Penelitian

Bagaimanakah pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung dalam pengelolaan sampah?

Tujuan

mengidentifikasi Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung



Output

Kondisi Pengelolaan sampah di Pulau Pasaran

Pemangku Kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan sampah di Pulau Pasaran

Pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan

Hasil

Pengaruh dan Kepentingan Para Pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.

Sumber: Peneliti, 2020

GAMBAR 1. 9
KERANGKA PENELITIAN

1.8. Keaslian Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat pengaruh dan kepentingan para pemangku kepentingan terhadap pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. Keaslian penelitian ini dilakukan berdasarkan referensi pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai tema dan karakteristik yang sama. Sehingga penelitian terdahulu dapat dijadikan dasar referensi dalam melakukan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang diambil.

TABEL I. 5
PERBANDINGAN KEASLIAN PENELITIAN YANG DILAKUKAN

No.	Peneliti	Judul penelitian	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Riesti Triyanti dan Indah Susilowati (2019)	Analisis pemangku kepentingan Dalam Pengelolaan Kawasan Pesisir Berkelanjutan di Kabupaten Gunung Kidul	Enam Kawasan pesisir Kabupaten Gunung Kidul Provinsi DIY Yogyakarta yaitu pesisir Baron, Drini, Gesing , Ngrehenan, Siung dan Ngandong.	menganalisis peran, kepentingan, pengaruh dan harapandari para pemangku kepentingan sebagai bahan untuk merumuskan strategi pengaturan kepentingan dalam pengelolaan kawasan pesisir berkelanjutan di kab. Gunung Kidul untuk mewujudkan kebijakan ekonomi hijau	Metode Analisis Pemangku kepentingan (<i>Stakeholders Analysis</i>)	terdapat 12 pihak yang memiliki keterlibatan dalam pengelolaan kawasan pesisir Kab. Gunung kidul. Kedua belas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan pesisir terdiri dari 6 pemangku kepentingan primer, 3 pemangku kepentingan kunci dan 3 pemangku keentingan sekunder.
2.	Iga Yulia (2016)	Kepentingan dan peran aktor dalam pengelolaan hutan mangrove di desa Pulau Pahawang Kecamatan	Desa Pulau Pahawang Kecamatan Marga Punduh Kabupaten Pesawaran	mengetahui matriks kepentingan dalam pengelolaan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang. Dan	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	matriks kepentingan hutan mangrove di Desa Pulau Pahawang terdapat enam kepentingan, yaitu keberadaan Jalur hijau untuk

No.	Peneliti	Judul penelitian	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Marga Punduh Kabupaten Pesawaran		mengetahui hasil pemetaan para aktor dalam pengelolaan hutan Mangrove di Desa Pulau Pahawang		dipertahankan, jenis keragaman, sarana pendidikan, kebutuhan pemenuhan kayu bakar, hasil hutan non kayu dan sebagai sarana wisata. aktor yang mempunyai kepentingan antara lain pengguna langsung (Masyarakat setempat) dan Pengguna tidak langsung (dinas teknis: Bappeda, BPN, DKP, Disbunhut, BLH serta LSM)
3.	Fitriyanti Arif, Mary Selintung, Ria Wikantari (2018)	Penanganan Sampah permukiman di kawasan Pesisir Kota Makassar	Kawasan pesisir Makassar, studi kasus di Kelurahan Lette dan Untia	Ingin memperlihatkan Hubungan antara sistem penanganan sampah terhadap kondisi sosial, ekonomi dan aksesibilitas di Kelurahan Lette dan Untia	Deskriptif dengan menggunakan teknik analisis matriks (Tabulasi silang) dan analisis statistik deskriptif	Terdapatnya kondisi sistem penanganan sampah terhadap kondisi sosial, ekonomi dan aksesibilitas di kawasan pesisir Kota Makassar.
4.	Angela Chatlya (2016)	Pengelolaan Sampah Pantai oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung	Pantai Sukaraja Kota Bandar Lampung	mengetahui dan menganalisis pengelolaan sampah pantai Sukaraja oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif	belum optimalnya penanganan permasalahan sampah yang dikelola oleh dinas Kesehatan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung, LSM Mitra Bentala dan masyarakat. Kinerja Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung dalam berkoordinasi dengan pihak LSM belum mampu menciptakan kader yang handal. sehingga pengelolaan sampah belum ada praktiknya

No.	Peneliti	Judul penelitian	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Fitriza Yuliana dan Septu Haswindy (2018)	Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Permukiman Pada Kecamatan Tungkil Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Kecamatan Tungkal Ilir Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan sampah permukiman, untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman, dan menganalisis hubungan karakteristik masyarakat dan lingkungan permukiman dan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman.	Metode Deskriptif Evaluatif dengan menggunakan Analisis Deskriptif Kualitatif	Faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah tingkat pendidikan, pendapatan, luas halaman, keadaan lingkungan dan persepsi masyarakat. Selanjutnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan tergolong rendah yaitu sebesar 56,0%, sedang atau cukup sebesar 25,0% dan tinggi atau baik sebesar 19,0%. karakteristik masyarakat dan lingkungan permukiman berhubungan positif sangat nyata dengan tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah permukiman.
6.	Nurtjahjawilasa et al. (2015)	Analisis Pemangku Kepentingan Dalam Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan	Lokasi dalam skala kementerian/pusat	Mengidentifikasi pemangku kepentingan, Membuat pengelompokan dan pengategorian pemangku kepentingan serta menyelidiki hubungan antara pemangku kepentingan yang terlibat dalam proses kebijakan pengembangan SDM Kehutanan ditingkat pusat/Kementerian.	Metode Analisis Pemangku kepentingan (Stakeholders Analysis)	enam belas pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan SDM Kehutanan di tingkat nasional yang terdiri dari dua pemangku kepentingan kunci, empat pemangku kepentingan utama dan sepuluh pemangku kepentingan pendukung.

No.	Peneliti	Judul penelitian	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Gandhi Rahma Puspasari dan Mussadun (2016)	Peran Kelembagaan Dalam Pengelolaan Persampahan di Kabupaten Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	Mengidentifikasi peran kelembagaan dalam pengelolaan persampahan di Kabupaten Trenggalek	Metode Analisis Korerasi Pearson untuk mengetahui hubungan antar kelembagaan, Analisis Crosstab digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antar kelembagaan, Analisis skala untuk mengukur seberapa besar peran masing masing kelembagaan.	Dalam kasus ini kelembagaan yang terkait dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek meliputi Pemerintah, Masyarakat, dan Pihak Swasta. Dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek ini hanya dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, sedangkan pihak swasta dan LSM belum berperan dalam pengelolaan sampah. Dalam artian, dapat dikatakan bahwa pengelolaan sampah di Kabupaten Trenggalek belum optimal, karena tidak semua pemangku kepentingan yang ada ikut berperan dalam pengelolaan sampah.
8.	Fitri Nur Fafriani et al. (2015).	Analisis Pemangku Kepentingan dalam Tranformasi Kebijakan Fiskal Hijau	Nasional dan Sub Nasional	Mengidentifikasi, membuat kategori, dan menyelidikan hubungan antar pemangku kepentingan di tingkat nasional dan sub nasional dalam merumuskan kebijakan fiskal hijau.	Metode analisis pemangku kepentingan.	Berdasarkan hasil identifikasi pemangku kepentingan menunjukkan bahwa terdapat 18 pemangku kepentingan yang terlibat dalam perumusan kebijakan fiskal hijau di tingkat nasional dan sub nasional (lokasi penelitian).

No.	Peneliti	Judul penelitian	Lokasi Penelitian	Tujuan Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Nurul Intan Afivah (2020)	Tingkat Pengaruh dan Kepentingan Para Pemangku Kepentingan Terhadap Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung	Pulau Pasaran, Kota bandar Lampung	mengetahui tingkat Pengaruh dan Kepentingan para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung.	Metode Analisis Deskriptif Kualitatif dan Analisis Pemangku Kepentingan.	Pemangku kepentingan yang memiliki kepentingan tinggi dan pengaruhnya tinggi hanya berasal dari pihak masyarakat dan juga LSM Mitra Bentala. Dan belum adanya metode pengelolaan sampah di Pulau Pasaran. dikarenakan sampah-sampah yang ada disana hanya dibuang kedalam laut, dibakar dan juga dijadikan timbuan yang nantinya menjadi daratan baru. Dengan metode pengelolaan sampah yang dilakukan oleh masyarakat saat ini dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dikarenakan belum tersedianya pengelolaan sampah di Pulau Pasaran.

Sumber: Olah Data Pustaka, 2020

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini membandingkan beberapa hasil penelitian yang telah ada sebelumnya baik dari tugas akhir, jurnal dan tesis yang memiliki kemiripan atau kesamaan topik penelitian yang diangkat oleh peneliti. Pada keaslian penelitian dilakukan perbandingan dari judul, lokasi penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian dan hasil dari penelitian tersebut. Hal ini bertujuan untuk memperlihatkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Dilihat dari penelitian sebelumnya, penelitian yang peneliti lakukan memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut baik dari segi judul, lokasi penelitian, tujuan serta fokus dari penelitian yang diteliti. Pada penelitian ini dilakukan pada lokasi yang berbeda di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Fokus dalam penelitian ini adalah mengetahui tingkat Pengaruh dan Kepentingan para Pemangku Kepentingan dalam Pengelolaan Sampah di Pulau Pasaran, Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, topik penelitian yang peneliti lakukan ini benar-benar asli.

1.9. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini terbagi ke dalam 5 (lima) bab. Dengan pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan bahwa bahasan awal terkait dengan hal-hal yang mendasari penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan sasaran penelitian, manfaat penelitian dan ruang lingkup penelitian dan juga metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini mulai dari metode pengumpulan data dan juga metode analisis penelitian. Pada bab ini juga terdapat tabel keaslian penelitian yang menunjukkan bahwa penelitian yang akan dibuat benar-benar hasil pemikiran peneliti dan sistematika penulisan yang menunjukkan alur penulisan dalam penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini dijelaskan kajian pustaka yang digunakan dalam penelitian. Kajian pustaka tersebut meliputi pengelolaan sampah yang kemudian dibagi menjadi empat yaitu pengertian sampah, jenis-jenis sampah, sumber sampah serta pengelolaan sampah dikawasan. Dilanjutkan dengan peran pemangku kepentingan yang didalamnya terdapat peran pemerintah, peran masyarakat, peran swasta, peran lembaga swadaya masyarakat dan peran akademisi. Dan yang terakhir yaitu berisi pengertian kepentingan dan pengaruh.

BAB III GAMBARAN WILAYAH STUDI

Pada bab ini dijelaskan gambaran wilayah studi dalam penelitian. Gambaran wilayah studi meliputi gambaran umum administrasi yang meliputi administrasi Kota Bandar Lampung, Kecamatan Teluk Betung Timur dan juga Pulau Pasaran. Dilanjutkan dengan jumlah penduduk yang ada di Kota Bandar Lampung dan jumlah Penduduk yang ada di Pulau Pasaran. Dilanjutkan lagi dengan jumlah sampah yang ada di Kota

Bandar Lampung serta yang terakhir yaitu kondisi sampah yang ada di Pulau Pasaran yang merupakan wilayah studi dalam penelitian.

BAB IV METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini berisi tentang hasil analisis yang dilakukan dalam penelitian berdasarkan data-data yang telah didapatkan dan metode-metode yang digunakan dalam melakukan analisis.

BAB V KESIMPULAN

Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, temuan yang didapatkan dalam penelitian, rekomendasi yang dapat diberikan dari hasil penelitian ke pada pemangku kepentingan yang terlibat maupun tidak terlibat dalam pengelolaan sampah, keterbatasan dalam proses melakukan penelitian, dan penelitian lanjutan yang dapat dilakukan selanjutnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.

